

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.5. Kajian Pustaka	10
1.5.1. Hukum Tanah Nasional	10
1.5.2. Hak Atas Tanah	13
1.5.3. Perolehan Hak Atas Tanah	16
1.6. Metode Penelitian	18
1.6.1. Tipe Penelitian Hukum	18
1.6.2. Pendekatan Masalah	19

1.6.3. Sumber Bahan Hukum	20
1.6.3.1. Bahan Hukum Primer	20
1.6.3.2. Bahan Hukum Sekunder	20
1.6.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum .	21
1.6.5. Analisa Bahan Hukum	21
1.7. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	22
BAB II	
AKIBAT HUKUM DARI PEMBUBARAN	
BPU-PPN GULA TERHADAP STATUS HAK ATAS	
TANAH YANG DIMILIKINYA	24
2.1. BPU-PPN Gula yang Berbentuk Badan Hukum	24
2.2. Pembubaran Badan Hukum BPU-PPN Gula	41
2.3. Akibat Hukum Pembubaran BPU-PPN Gula	45
BAB III	
TATA CARA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH	
BEKAS HAK GUNA BANGUNAN MILIK BPU-PPN	
GULA YANG TELAH DIBUBARKAN	49
3.1. Status Tanah yang Haknya Ingin Diperoleh	49
3.2. Pembelian Rumah Negara	57
3.3. Tata Cara Perolehan Hak Atas Tanah	72
BAB IV	
PENUTUP	85
4.1. Kesimpulan.....	85
4.2. Saran.....	86

DAFTAR BACAAN**LAMPIRAN**

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) ;
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
3. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 Tentang Penjualan Rumah-Rumah Negeri Kepada Pegawai Negeri Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Nomor 870) ;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) ;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1969 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) Tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904) ;
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960 Tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989) ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 1961 Tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Negara (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2229) ;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1963 Tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Gula Negara dan Perusahaan Negara Karung Goni (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 3) ;
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1968 Tentang Pembubaran B.P.U. P.P.N. Gula dan Karung Goni, B.P.U. P.P.N. Karet, B.P.U. P.P.N. Aneka Tanaman dan B.P.U. P.P.N. Tembakau (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 22) ;
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3573) ;
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3643) ;
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696) ;
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah

- Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515) ;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara ;
 15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 155) ;
 16. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;
 17. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Taata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan ;
 18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara ;
 19. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah ;
 20. Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1998 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal yang Telah Dibeli Oleh Pegawai Negeri dari Pemerintah ;

21. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1967 Tentang Pengarahan dan Penyederhanaan Perusahaan Negara Kedalam Tiga Bentuk Usaha Negara.



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 112/K/
Kelurahan Dr.Sutomo
- Lampiran II Surat-Idzin Penempatan Rumah Instansi B.P.U.-
P.P.N. GULA No.: AX-SIRI/ 65.006 tertanggal 18
Mei 1965
- Lampiran III Surat Idzin No. AX-PERSE/ 65.028 tertanggal 19
Mei 1965
- Lampiran IV Surat Keputusan Kepala Perwakilan P.N.
Perkebunan Wilayah IV No.: XX-SURKP/69.009.
tertanggal 22 September 1969
- Lampiran V Petikan Surat Keputusan Menteri Pertanian No.:
254/Kpts/OP/4/1970 tertanggal 23 April 1970
beserta Petikan Lampirannya
- Lampiran VI Surat Pengalihan Tugas Nomor : XX-
PERPG/79.054. tertanggal 16 Agustus 1979
- Lampiran VII Kutipan Surat Keputusan Menteri Pertanian No.:
930/Kpts/OP/11/1981 tertanggal 5 Nopember 1981
beserta lampirannya
- Lampiran VIII Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor :
29025/2003 tertanggal 1 Juli 2003

- Lampiran IX Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1963 Tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Gula Negara dan Perusahaan Negara Karung Goni
- Lampiran X Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1968 Tentang Pembubaran B.P.U. P.P.N. Gula dan Karung Goni, B.P.U. P.P.N. Karet, B.P.U. P.P.N. Aneka Tanaman dan B.P.U. P.P.N. Tembakau
- Lampiran XI Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1998 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal Yang Telah Dibeli Oleh Pegawai Negeri Dari Pemerintah
- Lampiran XII Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara
- Lampiran XIII Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara
- Lampiran XIV Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengadaan,

Penetapan Status, Pengalihan Status, Dan
Pengalihan Hak Atas Rumah Negara

Lampiran XV

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang
Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas
Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah

